



REALISASIKAN PELAYANAN MASYARAKAT SECARA MAKSIMAL

Kantor Pertanahan Kota Yogya Tingkatkan Kinerja

YOGYA (KR) - Kantor Pertanahan Kota Yogya sebagai instansi pemerintah penyelenggara pelayanan publik di bidang pertanahan berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan, salah satu upaya dengan melaksanakan Forum Konsultasi Publik.

"Menjadi amanat Undang-undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 khususnya Pasal 39 yang melibatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi. Kantah Kota Yogya berupaya untuk merealisasikannya dengan dilaksanakan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 30 Mei 2023," jelas Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogya, Rudi Prihantoro APTnh MM MH, Rabu (21/6).

Rudi menjelaskan, output dari kegiatan ini adalah masukan yang menjadi rekomendasi sebagai upaya lanjutan SKM yang telah didapatkan dari pengguna layanan di Kantor Pertanahan Kota Yogya saat setelah pengguna layanan menerima produk layanan.

"Hasil SKM Kantor Pertanahan Kota Yogya sampai dengan bulan Mei 2023 sebanyak 61 responden, 42 responden memberikan nilai sangat baik untuk seluruh variabel komponen yang meliputi persyaratan,

prosedur, tarif/biaya, waktu penyelesaian, produk layanan, respons, etika, sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan," jelasnya.

Sedangkan sisanya memberikan nilai baik pada variabel komponen prosedur dan etika 4 responden, respons 3 responden, sedangkan tarif/biaya, waktu penyelesaian, produk layanan, konsultasi dan pengaduan masing-masing 2 responden. Rekomendasi masukan perbaikan pelayanan yang disampaikan oleh narasumber dan para pemangku kepentingan yang hadir rencana aksi tindak lanjutnya dapat dikelompokkan menjadi 3 cluster.

"Pertama perbaikan langsung dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogya yang terdiri dari internalisasi peningkatan kualitas layanan, membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kualitas SDM dan pengendalian internal, peningkatan sarana dan prasarana," ujarnya.

Rekomendasi kedua, menurut Rudi, perbaikan dilakukan dengan kolaborasi melibatkan instansi/pihak lain, diantaranya peningkatan kualitas pembinaan PPA, menjalin korespondensi dengan media untuk meningkatkan informasi layanan-pertanahan kepada publik, sinkronisasi data wakaf.



Peserta Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan Kota Yogya.

"Pembinaan layanan pertanahan bertema wakaf ke lembaga terkait, mempelajari dan turut berkoordinasi dengan mitra kerja dan instansi pembina (kanwil/pusat) termasuk dalam melakukan optimalisasi inovasi layanan Jogja Smart Service, serta kolaborasi kerja sama lainnya ke mitra kerja," ungkap Rudi.

Selanjutnya, ketiga, mengusulkan rekomendasi tindak lanjut ke instansi berwenang yang

terdiri dari review standar pelayanan dan pengembangan sistem layanan, menyesuaikan dengan kebutuhan/perkembangan.

"Beberapa rekomendasi telah ditindaklanjuti, diantaranya internalisasi peningkatan layanan pertanahan dan peningkatan kualitas sarana prasarana layanan. Namun rekomendasi tersebut masih akan terus di-

laksanakan," tuturnya.

Tindak lanjut atas masukan Kelurahan dan Kemantren terhadap standar pelayanan telah dilakukan dengan perubahan blangko beberapa jenis layanan pertanahan seperti waris, surat pernyataan beda nama dan peningkatan hak menyesuaikan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren

Berbasis Elektronik, yang bisa pengguna layanan dapatkan secara langsung pada loket Kantor Pertanahan Kota Yogya, ataupun juga bisa didapatkan melalui sid/Blangko-OnlineJogya.

"Masukan terhadap pengembangan sistem layanan juga telah disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang memiliki otoritas untuk mengelola kebijakan/sistem layanan," imbuhnya.

Sementara, dalam Forum Konsultasi Publik menghadirkan narasumber dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Dr. Eko Suharto ST MSI dan praktisi media Rosihan Anwar SSos dan pemangku kepentingan pengguna layanan pada Kantor Pertanahan Kota Yogya, di antaranya dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Camat Umbulharjo, Lurah Mujamuju, KUA Umbulharjo, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Yogya, Pengurus IPPAT Kota Yogya.

Sedangkan peserta selaku penerima masukan penyelenggaraan pelayanan publik dalam Forum Konsultasi Publik ini adalah Aparatur Sipil Negara terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, Para Pejabat Pengawas, Manajer Loker dan Pelaksana, baik petugas front office ataupun back office. (Zie)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005